

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Fauzi Ismail Arif^{1*}

Debby Ratna Daniel²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*fauziismailarif@gmail.com

Abstrak

Penerimaan perpajakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun. Oleh karena itu, setiap transaksi penerimaan perlu dijaga validitasnya. Tujuan penelitian ini adalah memperbaiki kelemahan sistem informasi akuntansi agar menghasilkan nilai penerimaan yang valid dan selaras dengan proses bisnis di DJBC. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Teknik analisis menggunakan pendekatan wawancara, observasi, dokumen, rekaman arsip dengan melihat dari aspek pengendalian input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara sistem informasi akuntansi penerimaan dengan proses bisnis kepabeanan. Keduanya berjalan terpisah dimana sistem yang dibangun untuk keperluan akuntansi dan proses bisnis berbeda. CEISA sebagai sistem komputerisasi pelayanan, tidak terhubung dengan sistem penerimaan, sehingga diperlukan suatu proses lebih lanjut untuk menghasilkan laporan akuntansi. Selain itu, lamanya proses validasi penerimaan Sistem Akuntansi Umum mempersulit DJBC dalam meyakini validitas penerimaan yang tercatat dalam Sistem Akuntansi Instansi.

Kata Kunci: Billing, CEISA, DJBC, Kepabeanan, Proses Bisnis

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM EVALUATION OF TAX ACCEPTANCE OF DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISES

Abstract

Tax revenues of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) become the findings of the Supreme Audit Board annually. Therefore, each revenue transaction needs to be maintained for its validity. The purpose of this study is to improve the weaknesses of accounting information systems to generate valid acceptance value and aligned with business processes at DJBC. The research method used qualitative method with explorative approach. Analytical techniques used interview approach, observation, document, recording archive by looking from the aspect of control input, process, and output. The result of the research shows that there is not aligned between accounting information system of revenue with customs business process. Both run separately where systems built for different accounting and business processes are different. CEISA as a computerized service system, is not connected to the revenue system, so it needs a further process to produce accounting reports. In addition, the length of the validation process of validation of the General Accounting System makes it difficult for DJBC to believe in the validity of revenue recorded in the Institution Accounting System.

Keywords: Billing, CEISA, DJBC, Customs, Business Process

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di DJBC, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 masih ditemukan kelemahan pengendalian intern pada penerimaan perpajakan. Beberapa diantaranya adalah pertaman, penerimaan perpajakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tidak dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut Sistem Akuntansi Umum (SAU) atau disebut SAI *unmatch*. Kedua, data penerimaan SAU tidak dapat ditelusuri atau disebut SAU *unmatch*. Ketiga, metode rekonsiliasi penerimaan belum optimal

Implikasi SAI *unmatch* adalah adanya transaksi penerimaan yang diakui DJBC, tetapi tidak diakui BUN. Dengan kata lain, DJBC harus dapat membuktikan data penerimaan tersebut melalui dokumen sumber. Apabila DJBC tidak dapat menunjukkan dokumen sumbernya, maka asersi keberadaan penerimaan tersebut dapat dipertanyakan. Hal ini sangat berisiko karena dalam proses bisnis DJBC, mayoritas kewajiban perpajakan dibayar pada saat melakukan kegiatan kepabeanaan.

Sebaliknya, implikasi dari SAU *unmatch* adalah adanya transaksi penerimaan yang diakui BUN, tetapi tidak diakui atau belum dicatat DJBC. Hal ini dapat mengakibatkan penerimaan DJBC dinyatakan *understated*. Apabila penerimaan tersebut merupakan pembayaran pelunasan piutang, maka piutang

outstanding DJBC juga dapat dinyatakan *overstated*. Selama tahun 2012-2016, selalu terdapat selisih pencatatan penerimaan menurut SAI dan SAU (lihat tabel 1). Pada tahun 2016 terdapat SAU *unmatch* sebesar Rp202.945.574.441,00 dan SAI *unmatch* sebesar Rp12.708.325.866,00. Setelah dilakukan penelusuran atas SAI *unmatch*, ditemukan bahwa terdapat SAI yang sesuai dengan data SAU sebesar Rp 10.171.986.204,-. Sehingga atas penelusuran tersebut, masih terdapat SAI *unmatch* sebesar Rp2.536.339.662,00

Kesalahan akuntansi pendapatan dan piutang salah satunya disebabkan kelemahan pengendalian internal atas teknologi informasi (Grant, Miller, & Alali, 2008). Ditegaskan pula oleh Burks (2015), letak kesalahan teratas pada organisasi non profit adalah pendapatan dan piutang. Beberapa penyebab masalah sistem informasi diantaranya yaitu kesalahan perhitungan manual, pertukaran dokumen, kelemahan, dan ketidakcukupan pengendalian internal (Bell, Knechel, Payne, & Willingham, 1998). Padahal teknologi informasi dapat memperlancar proses bisnis, menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji (Maharsi, 2000). Jaringan teknologi informasi juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh akuntan untuk menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan kepadamanajemen

(Ghasemi, Shafeiepour, Aslani, & Barvayeh, 2011).

Sistem informasi akuntansi sangat penting bagi entitas bisnis karena dapat meningkatkan kecepatan, akurasi (Abdallah & Adel, 2013; Lim, 2013; Moorthy, Voon, Samsuri, Gopalan, & Yew, 2012), dan mendukung pelaporan keuangan secara *realtime* dan rinci (O'Donnell & David, 2000). Dengan demikian, sistem informasi akuntansi harus memperhatikan kepentingan pengguna informasi (Florin-Constantin, 2013; Gheorghe, 2012).

Berbagai aplikasi sistem informasi dengan berbagai platform teknologi dan perangkat teknologi informasi pendukungnya berdampak pada mahalnya pemeliharaan, tidak efektif, susah dikembangkan, dan sulit integrasi dengan sistem lain (Bisbal, Lawless, Wu, & Grimson, 1999). Kondisi tersebut membuat sistem informasi tidak dapat menyediakan dan mengolah informasi secara efektif bagi unit organisasi. (Surendro, 2007). Ketidaksinkronan proses bisnis dengan sistem informasi dapat menyebabkan risiko kehilangan penerimaan, pelanggaran, dan mengganggu pelaksanaan tugas (Huang, Yen, Hung, Zhou, & Hua, 2009). Padahal sulit untuk mengintegrasikan secara sistemik akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan hubungannya dengan proses bisnis (Patasiene, Zaukas, & Patasius, 2015; Sonnenberg & Jan vom, 2014).

Kebutuhan atas akuntabilitas membuat evaluasi sistem informasi

lebih kompleks dibanding sektor privat. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian sistem informasi untuk menjamin validitas, reliabilitas, dan keamanan informasi (Newcomer & Caudle, 1991). Rumitnya, meskipun pengendalian ditingkatkan, sistem informasi yang bertambah kompleks menyebabkan peningkatan kerentanan sistem informasi pula (Cong & Romero, 2013)

Hanya sedikit penelitian yang menghubungkan akuntansi dan teknologi informasi dari aspek manajerial dan pengendalian (Granlund, 2011). Padahal pengendalian yang tidak tersinkronisasi dengan proses bisnis dapat memperlama proses dan memperpanjang birokrasi (Cram & Gallupe, 2016). Di sisi lain, ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian (PP 71 Tahun 2010). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai harmonisasi sistem informasi akuntansi penerimaan dengan proses bisnis di DJBC penting untuk dilakukan.

TINJAUAN TEORI

Teori Keselarasan

Teori keselarasan menjelaskan bagaimana teknologi informasi dapat selaras dengan bisnis, dan bagaimana bisnis harus atau bisa selaras dengan teknologi informasi juga (Luftman dan

Brier, 1999). Keselarasan berarti aktivitas manajemen untuk mencapai suatu tujuan antara teknologi informasi dan fungsional organisasi, misalnya keuangan. Keselarasan bisnis dan teknologi informasi juga terkait dengan jumlah aplikasi teknologi informasi yang digunakan, infrastruktur dan organisasi, strategidan proses bisnis untuk mewujudkannya (Silvius, 2007).

Berdasarkan teori keselarasan, antara sistem informasi akuntansi harus selaras dengan proses bisnis yang dijalankan. Keduanya harus saling melengkapi dan bukan berjalan secara terpisah. Pemrosesan data untuk tujuan pelaporan keuangan dan tujuan proses bisnis selayaknya terintegrasi dan data yang digunakan adalah data yang sama. Integrasi data penerimaan dengan proses bisnis pelayanan kepabeanaan secara terkomputerisasi diperlukan sebagai bentuk harmonisasi sistem informasi akuntansi dengan proses bisnis. Disamping itu, ketersediaan data penerimaan dari SAU tetap dibutuhkan secara periodik sebagai pembanding data penerimaan yang tercatat dalam sistem DJBC. Konsekuensinya, ketika ada koreksi juga dilakukan di dalam sistem dan tercatat perubahannya untuk keperluan audit trail. Dengan demikian, pelaporan penerimaan menjadi satu kesatuan utuh yang diproses sistem.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen karena terkait dengan penyediaan informasi yang terintegrasi untuk membantu pengambilan

keputusan bagi berbagai tingkatan manajemen dalam suatu organisasi (Ioana-Diana, 2013).

Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi (Romney dan Steinbart, 2015), yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data;
- b. Mengubah data menjadi informasi;
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset dan data organisasi, agar tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

Ketika sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik, akan mudah bagi DJBC untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi lebih tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran utuh proses sistem informasi akuntansi penerimaan DJBC yang sebenarnya dan merangkai kembali sistem informasi tersebut agar selaras dengan proses bisnis. Hal ini sesuai dengan Sugiyono (2016) dimana untuk mendapatkan data yang mendalam, sebenarnya, dan pasti digunakan metode kualitatif.

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat DJPB, Kantor Pusat DJBC, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2017. Guna mengetahui lebih detail mengenai obyek penelitian tersebut, digunakan *purposive sampling* untuk memperoleh subyek penelitian sebagai berikut:

- a. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC (Informan I), selaku unit perbendaharaan tingkat Eselon I DJBC.
- b. Bagian Keuangan, Sekretariat DJBC (Informan II), selaku unit akuntansi tingkat Eselon I DJBC.
- c. Bagian Akuntansi Pelaporan Keuangan, Sekretariat Jenderal (Informan III), selaku unit akuntansi pengguna anggaran Kementerian Keuangan
- d. Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, DJPB (Informan IV), selaku unit penyedia data penerimaan berdasarkan SAU.

Data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur dan observasi partisipan moderat pada unit perbendaharaan dan keuangan DJBC. Data sekunder berupa dokumen dan rekaman arsip, diantaranya Perdirjen Penatausahaan Penerimaan, Perdirjen Rekonsiliasi Penerimaan, database penerimaan, dan SOP. Bukti penelitian yang terkumpul dikelompokkan dan dilakukan reduksi data dengan memilih hal yang pokok dan polanya, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2016).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Input

DJBC menggunakan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) sebagai sistem komputerisasi pelayanan kepabeanan. Namun, CEISA tidak berfungsi sebagai sumber data penerimaan. Mengapa CEISA

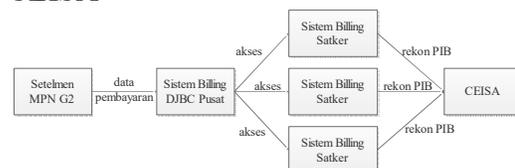
tidak dapat digunakan sebagai sumber data SAI, Informan I mengatakan:

Tau kan SAI dari CEISA bisa sampai 500 triliun akhirnya, karena ganda, duplikasi, bukan sumber SAI. Itu permasalahan juga tuh kemarin, BPK minta data SAI sumbernya CEISA, dia bandingin sama kertas kerja kita, kok banyak selisih. Sederhananya saya bilang, kita ga pernah jadiin CEISA jadi sumber SAI. Kalo dari awal kita yakinin kevalidan data CEISA, dari dulu sumbernya dari situ.

Aliran data penerimaan mulai dari Setelmen MPN G2 sampai CEISA dijelaskan pada Gambar 1. Data pembayaran dari Setelmen MPN G2 dikirimkan melalui sistem billing DJBC Pusat. Selanjutnya sistem billing DJBC meneruskan kembali kepada billing kantor pelayanan yang secara otomatis memadankan data dengan PIB di CEISA. Apabila data pembayaran billing ada padanannya dengan PIB, maka akan muncul status rekon di CEISA.

Gambar 1

Alur Data Setelmen Sampai CEISA



Sumber: Dit. PPS DJBC Tahun 2017 (data diolah)

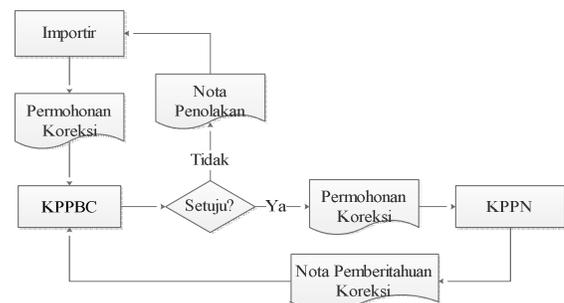
Adanya jeda waktu (*time lag*) antara pembayaran yang dilakukan oleh importir yang tercantum dalam setelmen MPN G2 sampai dengan data pembayaran diterima oleh sistem billing membuat pelayanan agak terganggu. Jeda waktu rata-rata enam jam tersebut membuat importir tidak bisa melakukan kegiatan kepabeanan seketika pada saat pembayaran telah dilakukan. Dengan demikian, sistem penerimaan yang masih belum dapat terhubung langsung seperti halnya perbankan mengganggu kecepatan proses kegiatan kepabeanan.

Sistem database antara biling DJBC pusat dengan tingkat satker berbeda. Pemisahan database billing antara pusat dengan satker membuat adanya data ganda. Alasan adanya pemisahan ini adalah kekhawatiran ketidakmampuan server yang digunakan langsung untuk pelayanan nasional, sehingga harus dipisahkan. Guna keperluan rekonsiliasi penerimaan, masing-masing satker akan mengunduh database billing sesuai dengan akses yang diberikan. Permasalahannya, data penerimaan yang diunduh dari data billing tingkat KPPBC dan KPU (satuan kerja) ada yang tidak lengkap. Jumlah data yang diunduh tidak sama atau lebih sedikit dibandingkan jumlah data pada database billing pusat. Data yang diunduh dari billing satker dimasukkan ke dalam kertas kerja penerimaan, padahal data tersebut tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan *understated* penerimaan DJBC, dimana nilai penerimaan yang dilaporkan lebih

rendah dibanding nilai penerimaan sesungguhnya. Nilai inilah yang nantinya dapat menjadi SAU *unmatch*.

Proses pengisian kertas kerja penerimaan tidak hanya mengandalkan data unduhan dari sistem billing. Data billing merupakan data awal pembayaran. Apabila terjadi koreksi data pembayaran yang diajukan oleh importir, maka kantor pelayanan akan melakukan koreksi di aplikasi billing dan mengajukan permohonan koreksi kepada KPPN (Gambar 2). Data koreksi inilah yang biasanya lupa digunakan pada saat mengisi kertas kerja penerimaan.

Gambar 2
Proses Koreksi Penerimaan



Sumber: Perdirjen Bea Cukai Nomor PER-33/BC/2016 (data diolah)

Mekanisme koreksi yang belum tersistem dapat menyebabkan adanya kesalahan input dalam data penerimaan. Terdapat celah kesalahan jika data penerimaan telah diunduh harian dan koreksi dilakukan pada hari berikutnya. Dengan demikian, apabila operator atau penatausahaan penerimaan tidak melakukan reuiu atas koreksi yang dilakukan, maka data penerimaan harian tersebut sudah tidak valid. Informan I menjelaskan:

... kalo pengguna jasa sudah mengajukan koreksi billing, di aplikasi billing kita ubah. Jadi kalo kita rubah ini kalo dia narik data, kecuali sudah ditarik dulu datanya baru ada permohonan koreksi. Misal transaksi hari senin, dia Selasa narik, koreksi hari Rabu, sebenarnya di aplikasi billing sudah berubah. Tapi karena dia narik duluan, akhirnya ga narik lagi disini, ya pake lama.

Selain koreksi yang dilakukan DJBC, juga terdapat mekanisme koreksi yang dilakukan internal DJPB. Informan IV mengatakan:

Di SPAN kan ada koreksi juga, bisa dari DJP ke BC, BC ke DJP, koreksi di internal kita. Jadi satker mengajukan koreksi ke KPPN, misal DJP ke DJBC, itu susah ketemunya. Dan itu hanya di SPAN saja. Jadi saat mengcreate NTPN, dimungkinkan ada 1 billing punya 2 NTPN. Nanti dicek nih sama KPPN. Penerimaan mana yang dipake, dicek ke bank. Misalnya yg tercatat di BC NTPN A, padahal di bank yang benar NTPN B. nah di kita pake yang B.

Disamping itu, Informan III mengatakan bahwa selisih penerimaan antara SAI dan SAU salah satunya disebabkan adanya koreksi yang tidak diketahui oleh DJBC.

Karena di SAU ada koreksi transaksi berapa, yang mengoreksi siapa. Bisa jadi SAU nya koreksi, yang BC nya ga diupdate. Padahal kondisi idealnya yang mengoreksi dari satker.

Pengendalian Proses

Mekanisme rekonsiliasi penerimaan yang masih belum tersistem membuat pengendalian proses dilakukan secara manual, yakni menggunakan kertas kerja berformat *excell*. Kertas kerja penerimaan (disebut KKA) secara *batch* seharusnya sama dengan aplikasi billing. Setelah data sesuai, maka dibuatkanlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sebagai data sumber catatan akuntansi dari unit perbendaharaan kepada unit keuangan sebagai penyusun laporan keuangan.

Penyusun laporan keuangan DJBC seringkali mengeluh data penerimaan terlambat disampaikan oleh Seksi Perbendaharaan DJBC. Padahal penyusunan laporan keuangan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan. Informan III yang menjadi tim verifikasi penyusunan laporan keuangan tingkat Eselon I DJBC menyampaikan bahwa:

Kenyataannya di lapangan pada saat laporan keuangan

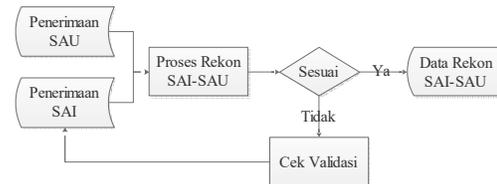
disusun, masih belum selesai juga laporan penerimaan maupun piutang. Menjadi kendala sendiri pada saat penyusunan.

Pengendalian Output

Rekonsiliasi penerimaan dilakukan dengan membandingkan data penerimaan DJBC yang diperoleh dari data billing yang dituangkan dalam kertas kerja penerimaan dengan data penerimaan SAU DJPB. Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU dilakukan dengan menggunakan delapan level berdasarkan elemen kunci. Elemen kunci dalam setiap level tersebut digunakan untuk menghindari adanya hasil rekon ganda. Kedelapan urutan level rekonsiliasi yaitu:

- a. Metode-1 dengan elemen kunci NTPN. TGL. NTPN. AKUN.NILAI;
- b. Metode-2 dengan elemen kunci NTPN. AKUN. NILAI;
- c. Metode-3 dengan elemen kunci NTPN. TGL. NTPN. NILAI;
- d. Metode-4 dengan elemen kunci NTB/NTP. AKUN. NILAI;
- e. Metode-5 dengan elemen kunci NTPN. NILAI;
- f. Metode-6 dengan elemen kunci TGL. NTPN. AKUN. NILAI;
- g. Metode-7 dengan elemen kunci BULAN NTPN. AKUN. NILAI;
- h. Metode-8 dengan elemen kunci NTPN.

Gambar 3
Rekonsiliasi Penerimaan Tingkat Eselon I



Sumber: Per-58/BC/2012 (data diolah)

Data *unmatch* dilakukan pengecekan kembali oleh satker mengenai kebenaran data yang tercatat pada SAI. Setelah dilakukan validasi, maka proses rekonsiliasi diulangi kembali.

Informan I menyampaikan bahwa penyebab adanya SAI *unmatch* salah satunya disebabkan oleh belum sesuai data SAU untuk rekonsiliasi.

12 M ini saya mulai telusuri-telusuri ternyata ada semua rata-rata. Dari sampling saya yang gede-gede itu aku cek SPAN ada, di OM SPAN.

Atas permasalahan ini, informan IV menyampaikan bahwa adanya proses validasi mulai dari pembayaran sampai dengan menjadi data penerimaan SAU menyebabkan keterlambatan data.

Itu antrian. Tapi kalo berbulan-bulan itu biasanya ada koreksi. Tapi memang ada validasinya mas. Sekarang kita lihat bulan Mei ini ya, kita lihat penerimaan bulan januari masih ada yang belum masuk.

Informan I juga mengatakan:

Data transaksi penerimaan itu masuk

SPAN, Cuma ada validasi, OLAF gitu sistemnya. Jadi setiap transaksi yang masuk butuh konfirmasi, dari perbankan dan semuanya validasi. Nah kalo sudah ok, baru masuk SPAN. Untuk data-data yang belum masuk, misal cut off triwulan 1, misal transaksinya cuma segini. Itu gara-gara banyak transaksi yang belum. Butuh validasi lama banget.

Adapun SAU *unmatch* salah satunya disebabkan oleh unduhan data dari sistem komputerisasi pelayanan (CEISA) belum dapat diambil utuh, sehingga data SAI kurang lengkap, informan I mengatakan:

Itu ada lepas karena sistem CEISA kita masih belum kredibel 100 persen. Kredibel dalam artian waktu tarik data... Ketika mereka tarik tiap hari dan tiap minggu, tarikannya beda. Pernah nih mereka iseng tarik dari minggu sampai sabtu, nah saya bandingkan sama per hari, ternyata jumlahnya ga sama. Jadi ada yang tertinggal gitu.

Selain itu, secara fungsi CEISA tidak dapat secara langsung digunakan

sebagai pelaporan. Hal ini ditegaskan oleh Informan I:

Karena CEISA itu pelayanan. BPK sempat nanya, bahwa CEISA impor, ekspor, SAC itu pelayanan. Jadi ga ada menu monitoring, report, khusus untuk pelayanan.

Perbaikan Sistem Informasi Akuntansi dan Proses Bisnis **Perbaikan Input**

Mekanisme pengendalian yang ideal berdasarkan teori keselarasan adalah menjadikan proses akuntansi selaras dengan proses bisnis yang ada. Sehingga menjadi satu kesatuan utuh, bukan menjadi dua hal yang berbeda. Sistem informasi akuntansi juga mendukung proses bisnis. Dengan demikian, harus ada kesatuan database yang digunakan baik untuk akuntansi maupun untuk pelayanan. Pemisahan database dengan alasan ketidakmampuan server adalah suatu hal yang kurang realistis mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, mengingat jenis dan jumlah transaksi yang masih terbilang jauh lebih rendah dibandingkan kerumitan transaksi perbankan. Database tunggal sudah selayaknya digunakan untuk proses bisnis agar segala laporan dan pengendalian lebih valid. Informan II menyatakan:

Jadi ga perlu lagi, gini loh, ngambil data itu kesalahan waktu ngambil itu kan, rekon pakai manual,

semuanya sudah sistem, kan kacau. Saya dulu audit saja, ada namanya EDP, data itu saya olah, saya masuk sistem perusahaan olah data, bukan ambil data saya olah. Karena takut salah.

Apabila data yang berasal dari pembayaran MPN G2 (Setelmen) terhubung dengan billing dan CEISA, DJBC lebih aman dan pasti dalam memverifikasi kegiatan kepabeanan yang diajukan. Sebagaimana penjelasan Informan II:

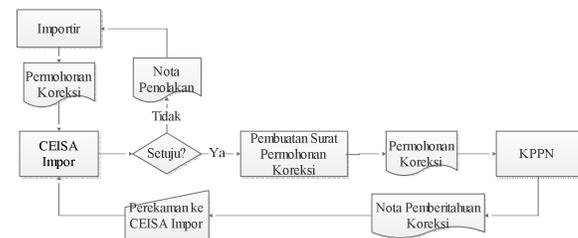
... Rekon untuk meyakinkan yang dibayar importir itu benar. Seharusnya MPN G2 bukti itu sudah selesai, kecuali ternyata bukti itu palsu atau apa. Tapi kalo dari sistem langsung, begitu MPN G2 mengeluarkan bukti, itu harusnya sudah selesai. Kalo ga, berarti sistem ini perlu dipertanyakan. Masalah duit. Bea cukai harusnya selesai sampai situ.

Terkait dengan adanya koreksi atas data pembayaran yang telah dilakukan, mekanismenya tetap melalui sistem. Sehingga tidak terjadi adanya penginputan ganda (*redundancy*). Koreksi yang dilakukan secara sistem juga dapat mendorong CEISA sebagai sumber data penerimaan, tidak hanya sebagai aplikasi pelayanan. Nota

pemberitahuan koreksi yang masih memerlukan surat manual dari KPPN dilakukan perekaman ke CEISA Impor sebagai notifikasi bahwa koreksi yang diajukan telah dibukukan di pembukuan SAU. Di sisi lain, seharusnya koreksi yang dilakukan internal DJPB diinformasikan kepada unit DJBC yang bersangkutan.

Gambar 4

Koreksi Data Pembayaran



Sumber: Bagian Keuangan DJBC Tahun 2017 (data diolah)

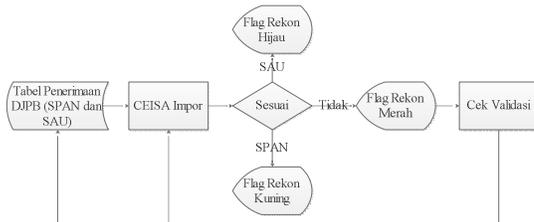
Koreksi yang diajukan Perbaikan Proses

Pengendalian proses penerimaan yang ideal semestinya dengan menjaga jumlah *batch* di SAU dengan batch penerimaan di sistem CEISA sesuai. Karena data dari MPN ke SAU perlu waktu yang relatif lama, data penerimaan di CEISA dapat dibagi berdasarkan *flag*, misalkan *flag* “rekon SAU”, “rekon SPAN”, atau “rekon MPN” sebagaimana penjelasan Informan II:

... harusnya ada kolom lagi, flag atau apa, saat dia sudah masuk SAU, otomatis isi.

Gambar 5

Proses Rekonsiliasi
Penerimaan Tingkat Eselon I
DJBC



Sumber: Dit. SITP DJPB (data diolah)
Kode billing digunakan sebagai elemen kunci karena kode tersebut tidak berubah sejak dari MPN sampai dengan SAU. Dengan demikian, secara proses, transaksi penerimaan tersebut terpantau. Pada tiap periode, dilakukan konfirmasi antara DJBC dengan DJPB untuk memastikan jumlah *batch* penerimaan telah sesuai.

Informan II menjelaskan bahwa mekanisme di perbankan saja lebih rumit dibanding DJBC sebagai berikut:

Mangkanya, itu nasional, ratusan juta transaksi per hari, dan jauh lebih banyak dari penerimaan kita yang tidak seberapa. Belum lagi sekarang pakai pihak ketiga, kayak ATM itu kan penyelenggara itu. Lebih rumit lagi. Dan transaksinya macam-macam, isi pulsa, bayar kartu kredit, ambil duit. Kita misalnya protes anu, langsung ditanggepin. Misalnya bayar, prosesnya belum finish, terputus,

terbayar atau ga, sudah pak. Simpel dia. Mangkanya kalo sistemnya benar-benar itu bikin online. Siapa yang mau ngecek rekon konfirmasi tapi online, terbuka. Saya tinggal masukin NTPN, keluar data.

Perbaikan Output

Rekonsiliasi penerimaan pun bukanlah suatu kegiatan khusus yang harus mengunduh dari aplikasi, mengisi kertas kerja penerimaan, lalu dilakukan rekonsiliasi dengan SAU. Namun rekonsiliasi terjadi secara sistem. Sehingga data yang diunduh dari sistem merupakan data yang sudah terekonsiliasi. Informan III menyampaikan:

Nah yang dilihat lagi kedepannya untuk mekanisme rekon harusnya dengan MPN G2 harus dikaji lagi mekanisme rekonna masih bisa dipakai atau diupdate lagi...

Tabel penerimaan DJPB (SPAN dan SAU) dihubungkan dengan menggunakan file kirim secara langsung ke database CEISA. Dengan demikian, setiap transaksi yang tercantum, langsung tersedia notifikasi untuk mengetahui validitas penerimaan tersebut. Apabila terdapat transaksi yang masih belum terekon penuh (rekon SAU) maka bukanlah DJBC yang membuktikan kebenaran pembayaran transaksi tersebut,

melainkan DJPB. Hal ini diungkapkan oleh Informan II:

Yang punya kewajiban merekon antara data MPN G2 ini, atau tagihan bank ini, atau transaksi pembayaran ini dengan sampai pembukuan akuntansi nya si perben tanggung jawabnya perben.

SIMPULAN

Secara umum, sistem informasi akuntansi penerimaan DJBC masih belum selaras dengan proses bisnis yang dijalankan. Masih terlihat adanya gap antara akuntansi dengan proses bisnis, sebagai contoh sistem komputerisasi pelayanan tidak dapat dijadikan sebagai sumber data penerimaan. Padahal seharusnya akuntansi bukanlah suatu upaya atau beban tersendiri. DJBC yang bertugas mengamankan penerimaan negara harus seiring sejalan dengan tugas memfasilitasi perdagangan. Hal ini memerlukan kecepatan proses validasi penerimaan dengan menghubungkan sistem penerimaan dengan sistem pelayanan.

Disamping itu, titik kritis pengendalian penerimaan berada di rekonsiliasi yang tidak tersistem Dukungan data validasi SAU dari DJPB sebagai data pembanding, dan meletakkan notifikasi *flag* penerimaan pada CEISA dapat memudahkan rekonsiliasi secara sistem. Hal ini sejalan dengan Huang dkk. (2009) yang menyatakan pentingnya mekanisme komputerisasi untuk mendeteksi perbedaan data. Implikasi

penelitian ini adalah perlunya perbaikan pada proses bisnis CEISA agar tidak hanya menjadi sistem pelayanan saja, melainkan terhubung dengan sistem penerimaan. Sehingga proses pelayanan kegiatan kepabeanaan lebih pasti dan aman dalam hal menjaga penerimaan negara tanpa mengorbankan pelayanan kepada pengguna jasa. Senada dengan Burks (2015), Newcomer dan Caudle (1991), penguatan pengendalian internal selain pengendalian aplikasi perlu ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, J., & Adel, A. (2013). The Impact of Using Accounting Information Systems on The Quality of Financial Statements Submitted to The Income and Sales Tax Department in Jordan. *European Scientific Journal*.
- Bell, T. B., Knechel, W. R., Payne, J. L., & Willingham, J. J. (1998). An Empirical Investigation of the Relationship Between the Computerization of Accounting Systems and the Incidence and Size of Audit Differences. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 17(1), 13-38.
- Bisbal, J., Lawless, D., Wu, B., & Grimson, J. (1999). Legacy Information Systems: Issues and Directions. *IEEE software*, 16(5), 103.
- Burks, J. J. (2015). Accounting Errors in Nonprofit Organizations. *Accounting Horizons*, 29(2), 341-361.
- Cong, Y., & Romero, J. (2013). On Information Systems Complexity and Vulnerability. *Journal of Information Systems*, 27(2), 51.
- Cram, W. A., & Gallupe, R. B. (2016). A Method to Evaluate Information Systems Control Alignment. *Journal of Information Systems*, 30(1), 117-135.
- Florin-Constantin, D. (2013). *The Users of Accounting Information and Their Needs*, Timisoara.
- Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M., & Barvayeh, E. (2011). The Impact of Information Technology (IT) on Modern Accounting Systems. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 28, 112-116.
- Gheorghe, D. (2012). The Accounting Information Quality Concept. *Economics, Management and Financial Markets*, 7(4), 326-336.
- Granlund, M. (2011). Extending AIS Research to Management Accounting and Control Issues: A Research Note. *International Journal of Accounting Information Systems*, 12(1), 3-19.
- Grant, G. H., Miller, K. C., & Alali, F. (2008). The Effect of IT Controls on Financial Reporting. *Managerial Auditing Journal*, 23(8), 803-823.
- Huang, S.-M., Yen, D. C., Hung, Y.-C., Zhou, Y.-J., & Hua, J.-S. (2009). A Business Process Gap Detecting Mechanism Between Information System Process Flow and Internal Control Flow. *Decision Support Systems*, 47(4), 436-454.
- Lim, F. P. C. (2013). Impact of Information Technology on Accounting Systems. *Asia-Pasific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities and Socialgy*, 3(2), 93-106.
- Maharsi, S. (2000). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 127-137.
- Moorthy, M. K., Voon, O. O., Samsuri, C. A. S. B., Gopalan, M., & Yew, K.-T. (2012). Application of Information Technology in Management Accounting Decision Making. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(3), 1.

- Newcomer, K. E., & Caudle, S. L. (1991). Evaluating Public Sector Information Systems: More Than Meets the Eye. *Public Administration Review*, 51(5), 377-384.
- O'Donnell, E., & David, J. S. (2000). How Information Systems Influence User Decisions: A Research Framework and Literature Review. *International Journal of Accounting Information Systems*, 1(3), 178-203.
- Patasiene, I., Zaukas, G., & Patasius, M. (2015). Integration of Business Game for Improving Literacy of Accounting Information Systems. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 304-308.
- Sonnenberg, C., & Jan vom, B. (2014). The Missing Link Between BPM and Accounting. *Business Process Management Journal*, 20(2), 213-246.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surendro, K. (2007). Pemanfaatan Enterprise Architecture Planning untuk Perencanaan Strategis Sistem Informasi. *Jurnal Informatika*, 8(1), 1-9.